

ANALISIS KEBIJAKAN PERLUASAN DAN PEMERATAAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN

YANG BERMUTU

Rosmini, Herlina², Nur Amalia³

¹ Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Jl. Cokroaminoto

e-mail: rosmini7498@gmail.com

² Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Jl. Poros Bone Sinjai

e-mail: herlinaa0905@gmail.com

³ Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Jl. Kesehatan

e-mail: nuramalia991110@gmail.com

ABSTRACT

Educating the life of the nation is the task of the state against it's people. Education is the noble ideal that has been outlined since this nation was born. With education this nation can contribute with other nations in the world. However, in reality access to education in society has not been evenly distributed. There are still areas, leading and left behind that require a lot of educational touch. Equity is required for access to education so that every citizen who has the same opportunity is educated. Government program ssuch as the SM3T or Bina Daerah program become the chosen strategy. However, it should be supported by the community as a Civil Society. People must also move to develop education.

Keywords: *Expansion, equitable access to education, Daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).*

ABSTRAK

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas negara terhadap rakyatnya. Pendidikan adalah cita-cita luhur yang telah digariskan sejak bangsa ini lahir. Dengan mengenyam pendidikan bangsa ini dapatberkontestasi dengan bangsa lain di dunia. Akan tetapi dalam realitasnya akses pendidikan dalam masyarakat belum merata seutuhnya. Masih terdapat daerah, terdepan terluar dan tertinggal yang membutuhkan banyak sentuhan pendidikan. Dibutuhkan pemerataan terhadap akses pendidikan agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang



sama mengenyam pendidikan. Program pemerintah seperti SM3T maupun program Bina kawasan menjadi langka strategis yang diambil. Meskipun demikian hal itu harus didukung dengan peran serta masyarakat sebagai Civil Society. Masyarakat juga harus bergerak untuk melakukan pengembangan pendidikan.

Kata kunci: *Perluasan, pemerataan akses kependidikan, Daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).*

PENDAHULUAN

Kebijakan sebagai keputusan legal bukan juga berarti bahwa pemerintah selalu memiliki kewenangan dalam menangani berbagai isu dan masalah publik. Setiap pemerintahan biasanya bekerja berdasarkan warisan kebiasaan-kebiasaan pemerintahan terdahulu. Rutinitas birokrasi yang diterima biasanya merefleksikan keputusan kebijakan lama yang sudah terbukti efektif jika diterapkan. Dalam konteks ini, penting dikembangkan proses kebijakan yang partisipatif dan dapat diterima secara luas sehingga dapat menjamin bahwa usulan dan aspirasi masyarakat dapat diputuskan secara teratur dan mencapai hasil yang baik. Kebijakan publik sebagai hipotesis artinya kebijakan dibuat berdasarkan teori dan proposisi-proposisi sebab akibat. Oleh karena itu, kebijakan hendaknya bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Hal ini penting agar kebijakan selalu mendorong orang untuk melakukan sesuatu, serta mampu memprediksi keadaan dan menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dengan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. Namun kebijakan bukanlah laboratorium tempat uji coba, karena sulit untuk mengevaluasi asumsi-asumsi perilaku sebelum sebuah kebijakan benar-benar dilaksanakan. Pemerintah mungkin memperkirakan bahwa sebuah paket pengurangan pajak akan mendapat respon positif dari rakyat. Tetapi, hingga pemerintah mengumumkan pengurangan tersebut dan mengukur dampaknya, para pengambil kebijakan harus selalu waspada karena akibat yang ditimbulkan kebijakan tersebut belum tentu sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Dalam konteks tersebut, pelajaran dan temuan-temuan dari hasil implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting. Artinya, pembuatan kebijakan yang baik didasari kemampuan dalam memahami pelajaran-pelajaran dari pengalaman-pengalaman kebijakan dan menerapkan pelajaran itu dalam langkah perumusan kebijakan berikutnya. Oleh karena banyaknya pemain dan kepentingan dalam perumusan sebuah kebijakan, mengintegrasikan pengalaman penerapan kebijakan dengan perbaikan kebijakan berikutnya tidak selalu mudah dilakukan. Temuan-temuan dilapangan mengenai

konsekuensi-konsekuensi kebijakan perlu dicatat dan didokumentasikan secara baik dalam sebuah naskah kebijakan sehingga dapat dipelajari dan disebarluaskan. Berkaitan dengan kebijakan publik sebagai tujuan dimaksudkan kebijakan menjadi alat untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik. Pembuat kebijakan harus mampu merumuskan tujuan yang ingin dicapai, karena kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru. Misalnya, sebuah kebijakan yang tidak memiliki tujuan jelas, program-programnya akan diterapkan secara berbeda-beda, strategi pencapaiannya menjadi kabur, dan akhirnya para analis dan kritikus akan menyatakan bahwa pemerintah telah kehilangan arah. Dalam kenyataannya, pembuat kebijakan seringkali kehilangan arah dalam penetapan tujuan-tujuan kebijakan. Solusi kerap kali dipandang lebih penting dari masalah. Padahal yang terjadi seringkali sebaliknya dimana sebuah solusi yang baik akan gagal jika diterapkan pada masalah yang salah. Dalam konteks ini, identifikasi masalah dan kebutuhan menjadi sangat penting. Oleh karena itu kebijakan yang baik dirumuskan berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang baik akan dapat merumuskan secara eksplisit pernyataan resmi mengenai pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan teori, proposisi dan model sebab-akibat yang mendasari kebijakan, serta hasil-hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Artinya, dalam sebuah lingkaran perumusan kebijakan, pilihan-pilihan tindakan yang legal dibuat berdasarkan hipotesis dari proposisi-proposisi berbagai teori guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan. Rumusan yang sederhana ini menunjukkan hubungan antara ketiga dimensi kebijakan di atas. Artinya, kebijakan publik sebagai pilihan tindakan legal, sebagai hipotesis dan sebagai tujuan merupakan tiga serangkai yang saling berkaitan satu sama lain sehingga ketiganya merupakan prasyarat sekaligus tantangan bagi kebijakan publik yang efektif.¹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang lebih dalam, mengembangkan teori, dan menggambarkan realitas yang kompleksitas fenomena yang

¹ Aminuddin Bakry, "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik," *Jurnal MEDTEK 2*, no. April (2010): 1–13.

diteliti.

penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Nawawi dan Martini/1996:73, penelitian yang berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya. karena menggunakan penelitian yang bersifat deksriptif berarti sumber data di ambil dari fakta-fakta yang ada atau yang sebenarnya dengan berdasarkan topik yang diangkat yaitu perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Hampir seluruh dimensi kehidupan manusia terlibat. Dalam proses pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan ada unsur politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, kesehatan, psikologis, sosiologis, bahkan agama. Bagaimanapun penanganan pendidikan harus mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut agar strategi dan kebijakan yang ditempuh benar-benar mengantarkan Indonesia pada tujuan yang dicita-citakan.

Begitu penting dan urgen pendidikan bagi manusia, maka kebutuhan akan pendidikan bermutu selain harapan semua orang, juga merupakan sarana utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memaksimalkan potensi diri yang dimiliki serta mampu mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia Indonesia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Mutu pendidikan tentu merupakan cita-cita semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan tersebut. Setidaknya ada dua alasan penting mengapa mutu pendidikan menjadi sangat penting. *Pertama*, Aspek persaingan, persaingan terjadi baik antar lembaga pendidikan maupun dengan dunia kerja. Saat ini setiap calon tenaga kerja harus dibekali dengan pendidikan yang bermutu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. *Kedua*, Munculnya kebebasan dan otonomi bagi institusi pendidikan yang mengharuskan pentingnya mutu di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.



Upaya menghadirkan pendidikan bermutu tentu saja bukan merupakan pekerjaan yang tanpa halangan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan, seperti pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kualitas guru, pengawas, kepala sekolah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, pengadaan dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan dan lain sebagainya. Namun realitas menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan mutu pendidikan antara berbagai jenis, jenjang dan lembaga pendidikan.²

Berkaitan dengan hal tersebut, kepala sekolah sebagai leader (pemimpin). Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Kepemimpinannya tersebut harus didukung dengan kepribadian yang baik. Sejauh mana kepala sekolah dapat mewujudkan peran-peran di atas, secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi seluruh komponen pendidikan, yang pada gilirannya dapat membawa efek terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.³

Kepala sekolah sebagai supervisor atau pengawas yang tugaskan di lembaga Depag maupun Diknas, harus benar-benar mengerti bantuan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh guru dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Meningkatkan mutu pembelajaran menjadi landasan profesionalisme supervisi pendidikan. Karenanya diperlukan perubahan dan pengembangan visi berorientasi pada mutu, kecerdasan siswa, dan paradigma baru pendidikan.

Pengawas adalah orang yang diberi tanggung jawab tugas dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kepengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan/sekolah.

Supervisi berfungsi membantu (assiting) memberi support (supporting) dan mengajak mengikutsertakan (sharing). Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Peranan itu tampak dalam kinerja supervisor yang melaksanakan tugasnya. Mengenai peranan supervisi dapat dikemukakan berbagai pendapat para ahli. Menurut Peter F. Olivia Seorang supervisor berperan sebagai:

1. Sebagai koordinator ia dapat mengkoordinasikan program belajar mengajar,

² No Title, n.d.

³ ASTUTI ASTUTI, "Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2019): 435–449.

tugas-tugas anggota staf sebagai kegiatan yang berbedabeda di antara guru-guru. Contoh konkret mengkoordinasi tugas satu mata pelajar yang dibina oleh berbagai guru.

2. Sebagai konsultan ia dapat memberi bantuan, bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun secara kelompok. Misalnya, kesulitan dalam mengatasi dalam tahap muka kelas.

3. Sebagai pemimpin kelompok ia dapat memimpin sejumlah staf mengembangkan kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Sebagai pemimpin kelompok ia dapat mengembangkan keterampilan dari kiat-kiat dalam bekerja untuk kelompok, bekerja dengan kelompok dan bekerja melalui kelompok.⁴

1. ANALISIS KEBIJAKAN

Kebijakan seringkali diterjemahkan dengan politik aturan program keputusan undang-undang peraturan Konvensi Ketentuan kesepahaman dan rencana strategis lainnya

Ada yang menyebut "policy" dalam sebutan kebijaksanaan, padahal maknanya berbeda dengan kebijakan. Dimana kebijaksanaan mencerminkan kearifan seseorang, sedangkan kebijakan merupakan aturan tertulis hasil keputusan resmi organisasi. Misalnya, kebijakan didefinisikan sebagai:

- a. Undang-undang
- b. Peraturan pemerintah
- c. Keputusan presiden
- d. Keputusan Menteri
- e. Peraturan daerah
- f. Keputusan Bupati dan
- g. Keputusan Direktur dan lainnya.

Dokumen kebijakan ini sifatnya mengikat. Wajib dilaksanakan oleh sasaran kebijakan. Hal Senada dijelaskan kebijakan merupakan keputusan pemerintah bersifat umum. Berlaku untuk seluruh anggota masyarakat (Abidin:2006). Begitu juga kebijakan itu memberi informasi pada kita tentang ruang lingkupnya bersifat umum (makro) sedang (meso) dan mendetail atau (mikro).

Banyak ahli maupun akademisi turut serta memiliki pendapat yang beragam tentang kebijakan sebagai proses pengambilan keputusan, sebagai dijelaskan Koontz dan

⁴ تتنت No Title اتنتت.

Donnell (1987) yang mengemukakan kebijakan (policy) adalah pernyataan atau pemahaman umum berisikan pedoman pemikiran dan proses pengambilan keputusan yang mengikat dan memiliki esensi pada batasan tertentu dalam pengambilan keputusan.

(William N. Dunn,2004). Kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku lainnya guna memecahkan suatu masalah yang menjadi perhatian banyak pihak.

Pakar lainnya kebijakan menjadi bagian dari perencanaan guna mempersiapkan seperangkat keputusan yang berhubungan dengan biaya, personil jadwal untuk mencapai tujuan (goals) yang dilakukan oleh sejumlah aktor terdiri pimpinan, bawahan, lembaga pemerintah, atau swasta dalam suatu bidang atau kegiatan tertentu (Wahab:1997). Begitu juga Charles Linndblom (1968) kebijakan itu berkaitan erat dengan proses pengambilan suatu keputusan karena pada dasarnya sama memilih diantara alternatif yang tersedia. Hal Senada diungkapkan Maskuri (2017) kebijakan adalah sebuah prinsip atau cara yang digunakan untuk dipilih dalam proses mengarahkan pengambilan keputusan.

Penggunaan istilah kebijakan oleh agen-agen pemerintah seringkali untuk menggambarkan rentang kegiatan yang berbeda-beda mencakup a. Definisi b. Tujuan c. Menentukan prioritas d. Menyusun rencana dan e. Menspesifikasikan aturan-aturan keputusan dalam rentang kegiatan kebijakan bisa diidentifikasi beberapa komponen dari kebijakan yaitu goal, plans, program, decision, effect (Jenkins,1978:15).

Hal Senada dijelaskan dasar-dasar kebijakan yaitu:

- a. Suatu penegasan dan tujuan
- b. Keputusan untuk mengatur mengendalikan mempromosikan melayani dan mempengaruhi lingkungan kewenangan
- c. Panduan tindakan rasional
- d. Strategi guna memecahkan suatu masalah
- e. Perilaku yang mempunyai sanksi
- f. Norma, konsistensi, peraturan, dan substantil
- g. Keluaran dalam sistem kebijakan, dan
- h. Pengaruh dalam pembuatan kebijakan yang mengarah pada implementasi dan sasaran (Duke dan Canady, 1991).

Dari beragamnya pemahaman tentang kebijakan dari berbagai pakar dan tokoh manajemen di atas dapat ditarik benang merah konsepsi kebijakan sebagai aturan atau



ketentuan yang tertulis dan keputusan formal lembaga atau organisasi sifatnya mengikat mengatur perilaku orang guna mencapai tujuan menciptakan tata nilai baru dalam institusi atau organisasi. Kebijakan juga jadi referensi para anggota organisasi atau institusi dalam berperilaku (behavior) atau kebijakan bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan peraturan dan hukum serta kebijakan bisa lebih adaptif dan interpretatif mengatur apa yang boleh dan tidak boleh. Kebijakan mestinya bersifat umum saja tanpa menghilangkan ciri lokal spesifik. Oleh karena itu kebijakan bisa memberi peluang di makna sesuai kondisi yang ada. Asumsi tentang kebijakan mempunyai status khusus dalam model rasional sebagai unsur yang secara relatif bertahan dalam uji konsistensinya. Dengan demikian, kita bisa berbicara tentang kebijakan luar negeri, kebijakan sosial, atau kebijakan pemasaran, kebijakan pendidikan, dimana seolah-olah istilah itu menunjukkan kebijakan lokal dan suatu tema universal, cara manipulasi lingkungan eksternal dari organisasi dan menggunakan tindakan bertujuan tertentu.⁵

2. LANGKAH-LANGKAH DALAM PERLUASAN DAN PEMERATAAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Pada jenjang pendidikan formal, secara umum perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama. Dalam hal ini anak-anak yang memerlukan perhatian khusus (children with special needs) juga belum sepenuhnya mendapat layanan pendidikan secara baik, termasuk dalam pendidikan dasar. Anak-anak yang tergolong ke dalam kelompok ini adalah mereka yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, maka harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang (planning). Dalam membicarakan planning (perencanaan) pembangunan, maka setidaknya-tidaknya ada dua pendekatan yang harus dipergunakan sebagai metode pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan secara administrasi negara (public administration)
- b. Pendekatan secara manajerial (management approach).

Pendekatan dengan cara manapun dipergunakan, baik secara administrasi negara manapun secara manajerial, kedua-duanya pasti terkait dengan tiga macam aspek, yaitu:

- a. Aspek filsafat

⁵ Arwildayanto, Arifin Sukung, and Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, Dan Aplikatif*, 2018.

- b. Aspek hukum
- c. Aspek politik.

Berkaitan dengan persoalan perluasan dan pemerataan pendidikan, maka pelaksanaan perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah secara komprehensif guna mewujudkan cita-cita dari UUD 1945 yakni "...mencerdaskan kehidupan bangsa".

Diketahui bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga jaminan pendidikan terhadap anak haruslah menjadi perhatian pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Di Indonesia, UUD 1945 merupakan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (konstitusi) telah menjamin hak-hak dasar dari anak-anak yang kondisi sosialnya kurang beruntung. Seperti halnya Pasal 34, Pasal 38, akan tetapi jaminan Negara terhadap nasib anakanak yang kurang beruntung tersebut kadang hanya sebatas retorika belaka. Pada realitasnya masih banyak anak-anak yang putus sekolah, masih banyak anak-anak yang terlantar dan masih banyak berbagai macam persoalan lainnya yang menyangkut anak yang belum mendapat perhatian penuh dari Pemerintah, khususnya permasalahan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi anak (masyarakat). Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak boleh dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografis.

Perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu padanan kata yang memiliki makna yang hampir sama. Perluasan pendidikan lebih menekankan bagaimana upaya pemerintah untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan, kemudian penyediaan sarana dan prasarana tersebut mencapai seluruh pelosok nusantara atau daerah-daerah terpencil. Pemerataan pendidikan memiliki arti yang lebih menekankan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama di dalam mengakses pendidikan. Dengan kata lain, tidak ada

perbedaan antara si miskin dan si kaya, demikian juga tidak terdapat perbedaan antara masyarakat kota dan masyarakat desa.

Secara nasional, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Diantaranya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), membebaskan biaya bagi sekolah dasar (SD), membuat program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) mendapatkan bantuan bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Pada sisi lain, harus diakui upaya-upaya pemerintah tersebut belumlah berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka putus sekolah yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya dari SMP menuju tingkat SMU, dan tidak menutup kemungkinan pula terjadi angka putus sekolah dari tingkat SD menuju tingkat SMP. Padahal pemerintah telah mencanangkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (WAJAR 12 Tahun) yang sebelumnya adalah Wajib Belajar Sembilan Tahun.⁶

3. PENDIDIKAN BERMUTU

Terkait dengan mutu Mardapi menyatakan bahwa, maka indikator dari kualitas pendidikan adalah kompetensi lulusan, yaitu kemampuan yang dimiliki lulusan. Kompetensi lulusan dapat berupa kemampuan yang dimiliki lulusan dicirikan dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dapat ditampilkan. Lebih jauh diungkap Mardapi bahwa usaha memperbaiki kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pengajaran dan kualitas evaluasinya. Dengan begitu, setiap usaha memperbaiki kualitas pendidikan harus mencakup usaha untuk semakin menyempurnakan sistem evaluasi yang digunakan.⁷

Astin mengungkap bahwa ada tiga hal yang harus dievaluasi agar hasilnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Ke-3 butir tersebut adalah masukkan, lingkungan sekolah dan keluarnya (out atau lulusan). Terkait dengan aktivitas belajar, pendidikan hasil belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses pendidikan. Semua proses di lembaga pendidikan formal pada akhirnya akan bermuara pada hasil belajar yang diwujudkan secara kuantitatif berupa nilai. Hasil belajar peserta didik tidak terlalu mudah untuk dinilai. Sebagaimana diketahui, tujuan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah pengetahuan (kognitif) dan sikap (afektif) relatif sulit untuk diamati, meski pun dapat diukur.

⁶ Kekuasaan Dan Pendidikan et al., "No Title" 2, no. 1 (2016): 53–64.

⁷ Mutu Pendidikan et al., "4603-10212-1-Pb" 1, no. 2 (2012).

Rumusan terinci secara konseptual, pendidikan yang bermutu tersurat di dalam tujuan pendidikan nasional. Namun secara operasional ada lima tolok ukur dalam menentukan pendidikan yang berkualitas, yaitu akuntabilitas, akreditasi, otonomi, evaluasi, dan manajemen (Sarbiran, 1997:7-8).

Akuntabilitas mengacu pada efisiensi dan produktivitas. Efisiensi berkaitan dengan pembiayaan, sedangkan produktivitas terkait dengan hasil. Semakin kecil biaya, tetapi semakin besar produknya berarti semakin efisien. Semakin sedikit biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dan pemerintah, tetapi hasilnya yang berupa kenaikan SDM dari para siswa, merupakan prinsip efisiensi.

Akreditasi diarahkan untuk mencapai standarisasi mutu pendidikan. Dari Pendidikan Dasar, SLTA, hingga Perguruan Tinggi, akreditasi sangat penting. Ini juga untuk menghindari pemborosan. Paling tidak, tidak sia-sia pemerintah dan orang tua mengeluarkan biaya untuk anaknya bersekolah, jika memang hasilnya memuaskan.

Sudah saatnya dalam pembaharuan pendidikan di dalam masyarakat madani, otonomi pendidikan mulai digalakkan. Sekolah diberi kewenangan untuk mengelola sebagian dalam hal penjaringan guru, siswa, mengembangkan penelitian, mengembangkan intra dan ekstrakurikuler, memanfaatkan waktu, fasilitas, dan keuangan dalam penyelenggaraannya.

Pada periode akhir masa pendidikan, melalui evaluasi dapat diketahui tingkat keberhasilan pendidikan, misalnya dengan nilai UAN. Untuk saat ini UAN merupakan salah satu indikator keberhasilan yang sangat menonjol. Namun "mendewakan" UAN mengakibatkan sekolah berlombalomba untuk "memompa dan mengkarbit" siswanya agar meraih UAN tinggi. Lebih celaka bila unsur afektif dan psikomotor tidak terurus alias terabaikan.

Manajemen sekolah secara otonom perlu ditingkatkan. Proses pembelajaran hendaknya berlaku prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan proses akademis atau pembelajaran dengan melibatkan berbagai instansi terkait yang lebih dikenal dengan human relation and public relation. Dengan keterlibatan instansi terkait link and match antara dunia pendidikan dan tuntutan dunia kerja dapat tercapai. Sebagai misal SMK (STM dan SMEA) melibatkan berbagai perusahaan dalam hal menentukan kurikulum sekolah sehingga lulusannya betul-betul dibutuhkan di masyarakat sebagai pasar kerja.

Selain itu dengan manajemen ini, siswa di didik untuk mandiri, tidak hanya



menunggu pasar kerja, tetapi menciptakan lapangan kerja.⁸

4. SOLUSI DALAM MENGATASI MASALAH PERLUASAN DAN PEMERATAAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Untuk itu maka diperlukan perluasan akses dan peningkatan memperoleh pendidikan. Hal ini merupakan salah satu tuntutan masyarakat untuk layanan di bidang pendidikan. Semua orang sepakat bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang memiliki kepulauan dengan kondisi geografis dan kondisi pendapatan daerah maupun penduduk yang bervariasi. Hal ini berimplikasi pada bervariasinya capaian pembangunan termasuk didalamnya pembangunan pendidikan. Perbedaan-perbedaan tersebut harus difasilitasi segera agar terjadi peningkatan sekaligus pemerataan mutu pendidikan. Solusi yang bisa ditawarkan misalnya seperti subsidi silang tenaga ahli, dana, dan fasilitas. Solusi lain yang mungkin dapat diimplementasikan adalah penyediaan media yang memungkinkan terjadinya pertukaran dan subsidi silang informasi pembelajaran.

Di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 arah pembangunan untuk RPJM ketiga yaitu dari 2005 sampai 2019 adalah “memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.”²³ Untuk itu maka dalam proses meningkatkan pemerataan akses pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa cara:

- a. Peningkatan daya tampung instansi pendidikan.
- b. Peningkatan pemerataan pendidikan melalui peningkatan efektivitas afirmatif policy. Dapat juga dengan penyediaan beasiswa khusus untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berkualitas.
- c. Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Kebijakan pada aspek pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas daerah, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai

⁸ Guru Berkualitas and Mutu Pendidikan, “Guru Berkualitas Kunci Mutu Pendidikan,” *Jurnal Ilmiah Guru Caraka Olah Pikir Edukatif* 0, no. 0 (2013).

golongan masyarakat yang berbeda baik secara ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan Tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.³² wajib belajar 9 tahun harus dituntaskan dengan memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial budaya misalnya Penduduk miskin, daerah perbatasan, daerah terpencil, maupun daerah pasca konflik.strategi yang dipilih adalah membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah serta lulusan SD atau sederajat yang tidak melanjutkan ke SMP atau sederajat untuk memperoleh layanan pendidikan.

Perluasan akses pendidikan merupakan satu dari empat skala prioritas yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kemendikbud serta menjadi arah pembahasan RNPk 2018. Pemerintah juga telah cara membuka akses pendidikan di 122 kabupaten atau kota yang masuk ke daerah terdepan, terluar dan Tertinggal melalui pembangunan infrastruktur fasilitas belajar. selain itu juga mendistribusikan guru di wilayah 3T. Kucuran dana yang dianggarkan oleh Kemendikbud mencapai 3,1 triliun tahun untuk pembangunan pendidikan di daerah pinggiran atau daerah 3T. dana tersebut untuk membiayai sejumlah program seperti pembangunan fasilitas fisik, seperti unit sekolah baru dan ruang kelas baru serta rehabilitasi dan revitalisasi sekolah yang rusak, Di samping itu juga termasuk program gizi anak sekolah dan program sanitasi sekolah.⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerataan dan perluasan pendidikan adalah kebijakan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Itulah sebabnya pemerintah pusat/daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar.

Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak boleh dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografis.

Untuk itu maka diperlukan perluasan akses dan peningkatan memperoleh pendidikan. Hal ini merupakan salah satu tuntutan masyarakat untuk layanan di bidang pendidikan. Semua orang sepakat bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang memiliki kepulauan dengan kondisi geografis dan kondisi pendapatan daerah maupun penduduk yang bervariasi. Hal ini berimplikasi pada bervariasinya capaian pembangunan termasuk didalamnya pembangunan pendidikan. Perbedaan-perbedaan tersebut harus difasilitasi

⁹ Ahmad Syafii, "Perluasan Dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)," Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam 4, no. 2 (2018): 153–171.

segera agar terjadi peningkatan sekaligus pemerataan mutu pendidikan. Solusi yang bisa ditawarkan misalnya seperti subsidi silang tenaga ahli, dana, dan fasilitas. Solusi lain yang mungkin dapat diimplementasikan adalah penyediaan media yang memungkinkan terjadinya pertukaran dan subsidi silang informasi pembelajaran.

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti yaitu pemerataan pendidikan di Indonesia belum berjalan secara maksimal. masih banyak wilayah di Indonesia yang pendidikannya masih dibawah standar. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun, upaya-upaya tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga untuk memajukan pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, hendaknya pemerintah lebih mengusahakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemantauan pendanaan dan distribusi barang dalam usaha pemerataan pendidikan harus lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto, Arifin Sukung, and Warni Tune Sumar. *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, Dan Aplikatif*, 2018.
- ASTUTI, ASTUTI. "Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2019): 435–449.
- Bakry, Aminuddin. "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik." *Jurnal MEDTEK* 2, no. April (2010): 1–13.
- Berkualitas, Guru, and Mutu Pendidikan. "Guru Berkualitas Kunci Mutu Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Guru Caraka Olah Pikir Edukatif* 0, no. 0 (2013).
- Pendidikan, Kekuasaan Dan, Manajemen Pendidikan, Nasional Dalam, and Penerbit Rineka Cipta. "No Title" 2, no. 1 (2016): 53–64.
- Pendidikan, Mutu, D A N Pemerataan, Pendidikan Di, and Muhammad Idrus. "4603-10212-1-Pb" 1, no. 2 (2012).
- Syafii, Ahmad. "Perluasan Dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)." *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2018): 153–171.
- التتت. *No Title*تتت, n.d.

